

BAB III

KEMENANGAN PARTAI KEADILAN DAN PEMBANGUNAN (AKP)

DALAM PEMILU TURKI TAHUN 2014

Dalam bab ini akan menguraikan tentang gambaran Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) meliputi sejarah AKP, Ideologi dan kebijakan AKP dan kemenangan dalam pemilu Turki 2014.

A. Gambaran Umum Partai Keadilan Dan Pembangunan

Dapat dilihat Rakyat Turki memilih AKP lebih banyak didorong oleh prestasi pemerintahan Erdogan daripada orientasi ideologis sekularisme dan Islam. Dalam kampanyenya pun AKP lebih banyak membeberkan keberhasilan pemerintahan Erdogan.²⁷ Kemenangan AKP menjadi bukti bahwa mayoritas rakyat Turki tidak terpengaruh dengan kampanye kalangan sekuler. Kaum pendukung sekularisme menuding PM Erdogan hendak merombak paham sekuler Turki dengan ideologi Islam.

A. 1. Sejarah Partai AKP

Tahun 1983, pada saat angin demokrasi bertiup di Turki, Erdogan menyertai partai RP (Refah Partisi/Partai Kemakmuran), juga pimpinan Erbakan. Tahun 1994, Erdogan terpilih jadi Wali Kota Istanbul, sebuah kota metropolitan terbesar dengan penduduk sekitar 10 juta. Karena RP selalu dicurigai politisi sekuler, maka pemerintah membubarkan RP. Erdogan

²⁷ http://ichwanarifin.blogspot.com/2007_07_01_archive.html

dianggap dapat mengguncangkan bangunan sekularisme setelah ia membacakan puisi yang bernuansa Islam. Dia ditangkap, kemudian dihukum 10 bulan, tapi entah apa sebabnya tiba-tiba dikurangi menjadi empat bulan.

AKP kemudian didirikan Erdogan dan Gul setelah melepaskan diri dari pengaruh Erbakan yang dianggap terlalu konserfatif terhadap Islam termasuk strategi politiknya. Mereka membawa partai lebih dekat kepada ide-ide sekularisme dan mencoba menanggalkan simbolisasi Islam dengan mengubah basis justifikasi atau interpretasi terhadap isu-isu krusial serta identifikasi terhadap kecenderungan baru pemilih. Suatu langkah yang disebut oleh Jillian Schwerdler sebagai moderasi politik. Proyek ini berhasil diterapkan dan memperoleh dukungan 34 persen pemilih pada pemilu 2002 dan berkat electoral threshold 10 persen yang membuat partai-partai sekuler tersisih dari parlemen.²⁸

Sebagai politikus berbakat dan cerdas, setelah pembebasannya, Erdogan tidak menyia-nyiakan peluang politik yang semakin terbuka. Pada 2001, partai baru AKP dibentuknya. Ibarat menjolok buah ranum yang hampir jatuh, dalam Dunia sekuler Turki sempoyongan. Sekitar 42 juta orang berhak memberikan suara pada pemilu dimana 14 partai dan 700 calon independen berusaha memenangkan kursi di parlemen yang beranggotakan 550 orang.

Meskipun banyak hal yang mencegah Erdogan agar jangan sampai menjadi perdana menteri, misalnya dengan mengaitkan dosa baca puisi yang dianggap anti-sekuler itu. Tetapi Erdogan tidak kehilangan akal. AKP cepat

²⁸ <http://www.republika.co.id/online-detail.asp?id=291983&kat-id=248>

mendukung upaya amandemen konstitusi yang membuka jalan baginya untuk jadi perdana menteri, dan berhasil. Pada Maret 2003 ia dilantik jadi perdana menteri. Popularitasnya semakin berkibar tak terbendung lagi. Dalam pemilu Juli 2007, untuk kedua kalinya AKP meraih kemenangan dengan 341 kursi di parlemen. Di tangan Erdogan, Islam menawarkan solusi, bukan slogan formalisme seperti yang diusung berbagai kelompok yang buta realitas.

AKP terbentuk pada tanggal 14 Agustus 2001, AKP yang didominasi kaum muda aktifis Islam ini berada dibawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan. Saat itu, dia dan rekan-rekannya membentuk AKP dengan mengusung ideologi baru sebagai kubu demokrat konservatif yang berjalan berdampingan dengan sekularisme. AKP bias dikatakan menjelmaan kembali partai Islam Refah yang pernah berkuasa pada tahun 1996 hingga 1997 yang telah berupaya untuk bersikap terbuka dan pro-Eropa dari pada berpihak kepada pihak sekuler.²⁹

A. 2. Ideologi dan kebijakan AKP

AKP, yang merupakan kelanjutan dari Partai Refah dengan paradigma baru yakni menerima konstitusi modern dan lebih moderat serta menghargai perbedaan gaya hidup AKP dengan mengusung ideologi baru sebagai kubu demokrat konservatif dan berjanji berjalan berdampingan dengan sekularisme Walaupun AKP masih tetap sebuah partai sekuler tapi

²⁹ Guliz Dinc, Durmak Yok, Yola Devam: A Close Look to The AKP's Election Success, Friderech Erbert Stiftung Turkei. No. 6 April 2008. hlm 1

kecenderungan ke-Islaman anggota-anggotanya membuat ia dilihat oleh banyak orang sebagai partai "Islam". Semboyan kampanye pemilu AKP berbunyi: "*Maju terus pada jalan yang sama. Jangan berhenti*".³⁰

Kebijakan serta prioritas utama AKP adalah upayanya dalam meningkatkan keanggotaan Turki Pada Uni Eropa, membuka kesempatan yang luas bagi investasi asing, mendukung program IMF dan membuka negosiasi bagi perubahan-perubahan apabila dianggap perlu (contohnya, menghapuskan undang-undang larangan berjilbab), mencabut kendala legal dalam kebebasan dan hak-hak fundamental, mengimplementasikan sekularisme sesuai dengan konstitusi.

A. 3. Pencapaian AKP

Sejak pertama kali berdiri pada tahun 2001, AKP sudah menunjukkan pownya di Turki. Pendekatan yang dilakukan oleh AKP adalah dengan memfokuskan usaha untuk mendampingi khalayak ramai di samping menampilkan manifestasi terhadap kewibawaan yang dipimpin oleh Erdogan selama ini. Pencapaian yang dicapai AKP pun sangat laur biasa diantaranya

1. Dalam pemilu November 2002, AKP keluar sebagai pemenang dengan meraup 363 dari 550 kursi yang tersedia di parlemen.
2. Dalam pemilu Juli 2007, untuk kedua kalinya AKP meraih kemenangan dengan 341 kursi di parlemen
3. Dibawah kepemimpinan AKP pemerintahan Turki pertama yang berhasil melobi Uni Eropa bersedia berunding sejak tahun 2005 tentang masuknya

³⁰ Ibid

ekonomi dalam upaya bergabung dengan Uni Eropa, menarik penanam modal asing dan meningkatkan catatan hak asasi manusia di Turki.

4. Pemerintahan AKP berhasil melakukan reformasi ekonomi fantastis hingga mencapai pertumbuhan 7 persen per tahun, mampu memberantas praktik korupsi, dan bisa menunjukkan kebersihan pemerintahannya
5. Kemenangan pemilu 2014 dengan raihan suara 46.3 persen dan pemilu presiden dengan prosentase 51,79%

B. Sejarah Kemenangan Partai AKP (Adalet Ve Kalkinma Partisi) atau Partai

Keadilan dan Pembangunan

AKP merupakan sebuah partai yang baru didirikan pada tahun 2001 oleh Recep Tayyip Erdogan. AKP yang merupakan pecahan dari partai pro Islam yang di pimpin oleh Necmettin Erbakan yaitu partai FP (Fazilet Partisi) dan RP (Refah Partisi) atau Partai Kesejahteraan Islam pada tahun 1970an, Yang sebelumnya merupakan suatu gerakan reformis Islam yang juga dipimpin oleh Erbakan yaitu The Milli Görüş Movement (National Outlook).³¹ Ketika Erdogan menjadi ketua sementara Partai Kesejahteraan Islam (Refah Partisi) atau RP , Erdogan membuat cara agar partai sayap kanan dapat memenangkan pemilihan

³¹Ahmed T. Kuru, *The Gülen Movement vs. the Milli Görüş Movement: Faith Service vs. Political Islamism*, diambil dari *Changing Perspectives on Islamism and Secularism in Turkey: The Gülen movement and the AK Party*, 2008, Hlm144.

umum, yaitu dengan menyertakan segmen masyarakat yang tampaknya terasing oleh identitas elit kemalist.³²

Kampanye itu sangat sukses dan menghasilkan partisipasi pemilih sangat tinggi untuk tahun 1989 pada pemilu lokal. Pada tahun 1994 pemilu lokal, ia kembali bekerja secara intensif untuk mendapatkan dukungan dari lingkungan kelas menengah di Istanbul. RP bahkan memenangi pemilu nasional 1995, tetapi meskipun menjadi partai terbesar di parlemen, Namun RP tidak memiliki dukungan untuk membentuk pemerintah kecuali untuk periode singkat pada tahun 1996-1997.³³ Setelah pelarangan Partai Kesejahteraan oleh Mahkamah Konstitusi Turki pada tahun 1998 dengan alasan bahwa itu adalah anti-sekuler, Kemudian Erdogan mendirikan partai AKP pada tahun 2001. AKP memenangkan pemilu pada tiga periode berturut-turut antara tahun 2002, 2007 dan 2009. Dengan perolehan suara pada tahun 2002 sebesar 34,28% suara, hasil tersebut menempatkan AKP sebagai mayoritas tunggal dan menguasai 363 kursi di Parlemen.³⁴ Sementara tempat kedua, dikuasai oleh partai sekular terbesar di Turki yaitu CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) atau partai Republik dengan perolehan suara 19,39% suara dan menguasai 178 kursi di parlemen.³⁵

Kemudian kesuksesan AKP pada pemilu tahun 2002, kembali berulang pada tahun 2007 dengan tingkat perolehan suara yang meningkat menjadi

³² Cemal Karakas, Turkey: Islam and Laicism Between the Interests of State, Politics, and Society, PRIF Reports No. 78, Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), 2007, Hlm 22.

³³ Cemal Karakas, Turkey: Islam and Laicism Between the Interests of State, Politics, and Society, PRIF Reports No. 78, Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), 2007, Hlm 28.

³⁴ Laporan Tahunan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Turki, Ankara-Turki, 2002, hlm 2

³⁵ Ibid, hlm 4.

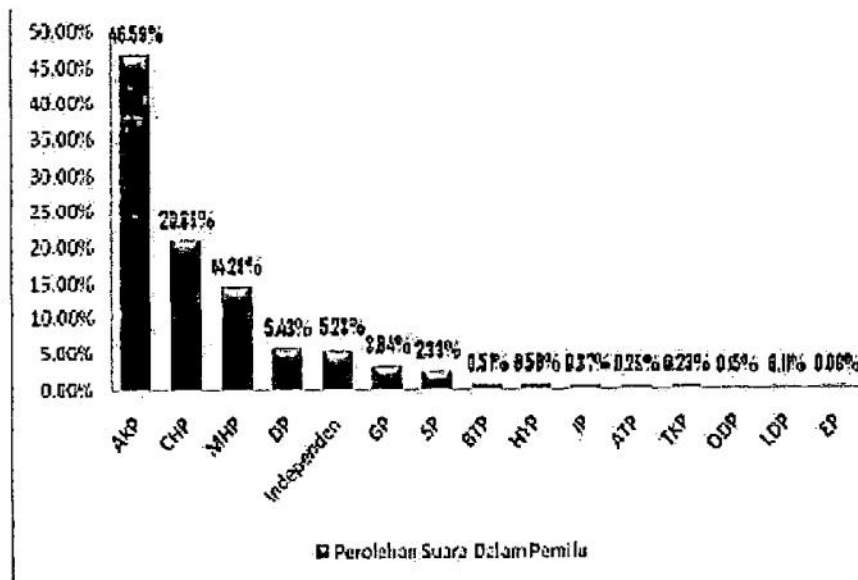
46,6%.³⁶ Kemenangan AKP dalam Pemilu Turki 2007 dan pada pemilu 2014 mendapat mendapat 45% hal ini menunjukkan semakin kuatnya partai berbasis Islam ini. Dengan demikian AKP yang dipimpin Erdogan adalah partai berhaluan islam yang mengukir prestasi paling gemilang sejak diproklamirkannya negara Turki modern. Meskipun, AKP baru didirikan pada bulan Agustus tahun 2001, usia yang sangat belia bagi sebuah partai politik. Kemenangan AKP menjadi bukti bahwa mayoritas rakyat Turki tidak terpengaruh oleh kampanye kalangan sekuler yang menudingnya sebagai partai yang membawa misi menghancurkan sekularisme. Sebelumnya, kaum pendukung sekularisme menuding Perdana Menteri Erdogan hendak merombak paham sekuler Turki dengan ideologi Islam. Namun, tuduhan itu dibantah oleh seorang profesor sosiologi dan pakar pergerakan Islam, Nilufer Gole. Ia mengungkapkan pembelaannya dengan mengatakan bahwa: “ ini bukan Islamisasi, tetapi partai berideologi Islam membaaur dengan tradisi demokrasi. Ia merupakan keberhasilan sistem parlemen pluralis Turki dan dapat menjadi contoh evolusi sebuah pergerakan Islam radikal.”³⁷

Ideologi dan basis gerakan AKP sesungguhnya berakar dari Partai Refah. Partai ini memiliki basis pemilih muslim yang ingin kembali kepada syari'at Islam dan menentang sekulerisme. Akan tetapi, catatan keberhasilan partai-partai politik Islam di Turki belum mampu membawa perubahan yang signifikan. Partai-partai ini selalu mengalami pasang surut. Sebab, kemenangan demi

³⁶ Angel F. Rabasa dan Stephen Larrabee, *The Rise of Political Islam in Turkey* diambil dari, *The Islamic Landscape in Turkey Religion, Ethnicity, and Politics*, RAND (National Defense Research Institute), 2008, hlm 2.

³⁷ Cemal Karakas, *Turkey: Islam and Laicism Between the Interests of State, Politics, and Society*, Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), 2007, PRIF Reports No. 78, hlm 24.

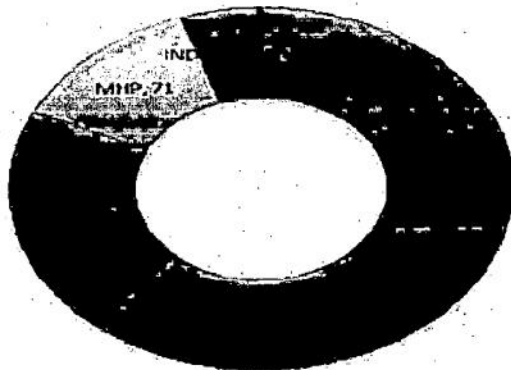
kemenangan yang diraih selalu diikuti dengan pembubaran partai politik. Kecuali kehadiran rezim AKP yang mampu menghabiskan dua periode pemerintahan, memenangkan Pemilu kembali serta lolos dari guncangan manuver politik kalangan sekuler dan tidak dibubarkan sebagaimana partai-partai politik sebelumnya. Inilah wujud dari bangkitnya Islam politik di Turki. Berikut adalah Grafik Perolehan suara.³⁸



Grafik perolehan suara diatas adalah hasil pemilu langsung yang dilaksanakan tanggal 22 juli 2007. Data tersebut dikumpulkan dari 160.000 tempat pemungutan suara. Sekitar 42 juta orang berhak memilih partai untuk pemilu ini. Dari data diatas dapat diketahui hasil suara terbanyak didapatkan AKP yaitu dengan presentase 46.59%, dan jauh dibawahnya dengan perolehan suara 20.86% yaitu Partai Republik (Cumhuriyet Halk Partisi) atau CHP, dan Partai Pergerakan Nasionalis (Milliyetci

³⁸ Hasil Suara Pemilu, diakses pada hari 2 Oktober 2014 Juli pukul 17:00 WIB melalui <http://www.turkishdailynews.com.tr/vote200/article.phpnewsid=51>

Hareket Partisi) MHP mendapatkan 14.29% suara. Sedangkan Partai demokrat (Demokrat Parti) mendapat 5.43% suara jumlah ini berselisih sedikit dengan partai Independen berjumlah 5.23% suara. Dan partai-partai lainnya hanya mendapatkan persentase dibawah 5%.⁹ Dan berikut dibawah ini adalah data perolehan kursi di Parlemen.



Pemilu nasional berikutnya diadakan pada tanggal 22 Juli 2007 ketika partai Erdogan tidak hanya muncul sebagai pemenang tetapi juga terutama meningkatkan pangsa suara nasional (47%).³⁹ Persentase ini membuat AKP kembali menjadi pemerintahan partai tunggal. Dewan pemilihan Turki menegaskan bahwa jumlah pemilih hampir 80%.⁴⁰ Pemilu terbaru Turki, yang berlangsung pada tanggal 29 Maret 2009 tidak sebesar pemilu sebelumnya suara turun menjadi sekitar 40%, sedangkan partai oposisi utama, CHP tersebut meningkat suaranya.⁴¹

Setelah pemilu 2007, sebuah referendum konstitusi pada reformasi pemilihan berlangsung. Isu utama dalam referendum adalah proposisi bahwa presiden Republik

³⁹ <http://www.turkishdailynews.com.tr/vote200/article.phpnewsid=51>

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Hurriyet (Koran Harian Turki), Ruling Party Main Loser in Local Ballot, diakses <http://www.hurriyetdailynews.com>

Turki harus dipilih langsung oleh suara rakyat bukan oleh satu parlemen. Konstituen sekuler berpendapat bahwa ini merupakan upaya Erdogan untuk mengamankan pos presiden berikutnya untuk dirinya sendiri atau anggota partainya. Ini akan berarti bahwa setiap partai politik yang memiliki mayoritas suara telah mendapatkan pengamanan dari kudeta.

Perubahan penting selanjutnya adalah bahwa perdana menteri saat ini, presiden dan menteri luar negeri yang dipandang lebih Islamis dan konservatif,⁴² dan dapat dikatakan lebih reflektif. Apapun masa depan bagi AKP dan kesuksesan dalam pemilu, satu hal yang pasti: AKP telah berhasil mengubah identitas nasional Turki melalui serangkaian kebijakan-kebijakan dirumuskan dengan sangat berpendidikan barat yang tampak teknokrat dan diplomat, namun juga tidak melupakan sejarah kekaisaran Ottoman yang pernah Berjaya sebagai sebuah peradaban islam terbesar. Dan AKP merangkumnya dalam sebuah kebijakan luar negeri untuk mendapatkan legitimasi dari dunia Internasional sebagai sebuah kekuatan baru.⁴³

PARTAI Keadilan dan Pembangunan (AKP) Turki kembali memenangkan Pemilu legislatif tahun 2014. Sebuah kemenangan besar dengan raihan suara 46.3 persen, jauh meninggalkan para pesaing terdekatnya seperti Partai Rakyat Republik (CHP) yang hanya memperoleh 20,9 persen dan Partai Aksi Nasionalis (MHP) yang menduduki tempat ketiga dengan suara 14,2 persen atau sekitar 71 kursi. Dengan kemenangan mayoritas, maka AKP dapat kembali membentuk pemerintahan dan tidak memerlukan koalisi dengan partai-partai lain. Recep Tayyip Erdogan sudah bisa

⁴² Qantara German News Agency, Turkey's Strategic Depth, diakses 20 Oktober 2014. 16:09.

⁴³BBC, Turkey Court Rules Reforms Valid, diakses dari <http://www.bbc.co.uk/news/> 20 Oktober 2014. 15:45

dipastikan kembali akan menduduki singgasana Perdana Menteri Turki untuk periode kedua. Selanjutnya Pemilihan umum presiden diselenggarakan di Turki pada tanggal 10 Agustus 2014 untuk memilih Presiden Turki ke-12.⁴⁴

Pemilu ini dimenangkan oleh Perdana Menteri Recep Tayyip Erdoğan. Jika tidak ada kandidat yang memperoleh suara lebih dari 50% pada putaran pertama, maka pemilu putaran kedua akan digelar pada tanggal 24 Agustus antara dua kandidat yang memperoleh suara tertinggi. Namun, pemilu putaran kedua tidak akan digelar karena Erdogan memperoleh suara lebih dari 50%. Pemilu ini diikuti oleh tiga kandidat.

Pemilu ini adalah pemilu presiden pertama di Turki yang diselenggarakan secara nasional, tidak seperti pemilihan anggota parlemen. Lebih dari 55 juta warga negara memberikan hak pilihnya, baik yang berada di Turki ataupun di luar negeri. Recep Tayyip Erdoğan, ketua Partai Keadilan dan Pembangunan yang terpilih sebagai Perdana Menteri pada tahun 2002, memenangkan pemilu ini dengan perolehan suara 51,97%

Mantan Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam Ekmeleddin İhsanoğlu, yang maju sebagai kandidat dengan usungan dari 13 partai oposisi seperti CHP dan MHP, berada di posisi kedua dengan perolehan suara 38,44%. Ketua Partai Demokratik Rakyat Selahattin Demirtaş, yang didukung oleh 8 partai sayap kiri lainnya, menempati posisi ketiga dengan perolehan suara 9,77%.⁴⁵

⁴⁴ "Turkey sets Aug 10 for presidential election: source". Diakses 8 November 2014.

⁴⁵ http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Contribution%20Folders/HaberDosya/2014CB-Gecici-416_d_Genel.pdf/

Tabel 1
Perolehan Suara Pemilu Presiden Turki 2014

Kandidat		Suara	Persentase
1	Recep Tayyip Erdoğan	21,000,143	51.79
2	Ekmeleddin İhsanoğlu	15,587,720	38.44
3	Selahattin Demirtaş	3,958,048	9.76
Suara tidak sah/kosong		737,716	—
Total		41,283,627	100
Pemilih terdaftar/persentase		55,692,841	74.13
Sumber: <u>YSK</u>			

Kemenangan AKP tidak hanya merupakan bukti pengakuan rakyat Turki terhadap prestasi pemerintahan Erdogan namun, sekaligus dimaknai pula sebagai kemenangan sayap politik Islam terhadap sekularisme. Bagi para sekularis, kemenangan AKP dikhawatirkan akan merusak pemisahan agama dan negara yang selama ini menjadi pijakan nilai-nilai sekularisme. Sejarah panjang sekularisme telah menempatkannya sebagai prinsip dasar yang selama ini menjadi tradisi politik, ketatanegaraan dan kehidupan masyarakat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Turki. Sekularisme Turki tidak dapat dilepaskan dari gerakan pembaruan yang dipimpin Mustapha Kemal Pasha (Kemal Ataturk). Gerakan Ataturk itu, telah berhasil menutup sejarah rezim Kesultanan Usmani dan mengubah Turki menjadi republik pada 1923. Sejak saat itu, nilai-nilai sekularisme di terapkan di Turki. Mulai dari hal yang prinsip seperti pemisahan agama dan negara sampai pada aspek teknis seperti pelarangan pemakaian simbol agama dan feodalisme (peci turki, jilbab/cadar, dan sebagainya) dalam kehidupan sehari-hari menjadi prinsip dasar yang harus dipatuhi warga negara Turki.

Sekularisme berhasil membawa Turki keluar dari masa kegelapan feodalisme. Sejalan dengan penerapan sekularisme, Turki menjadi negara maju dan sejajar dengan negara-negara Barat. Namun sejarah juga mencatat, situasi politik Turki selepas menjadi republik tidak luput pula dari catatan negatif yang mencederai tatanan demokrasi di negeri itu. Antara lain, perebutan kekuasaan oleh tentara mewarnai beberapakali perubahan rezim pasca Kemal Atatur. Tercatat kudeta militer terjadi pada 1960, 1971 dan 1980. Jeneral Kenan Evren yang merebut kekuasaan pada 1980 bahkan bertindak lebih represif. Partai politik di bubarkan, pelarangan kritik terhadap pemerintah, beberapa media massa diberangus, lawan-lawan politik dipenjarakan dan sebagian diantaranya mengalami kematian secara tidak jelas. Militer secara tradisional merupakan pendukung utama sekularisme. Oleh karena itu, tentara berkepentingan agar nilai-nilai sekularisme tetap diterapkan oleh siapapun rezim yang berkuasa di Turki. Maka tidak mengherankan jika tentara menolak keras Abdullah Gull sebagai calon presiden yang ditunjuk AKP. Tentara bahkan mengancam akan ikut campur dalam pemilu demi menjaga sekularisme. Apalagi tentara tidak asing dengan praktik kudeta militer. Hal inilah yang menjadi perhatian Erdogan dan pimpinan AKP lainnya. Sehingga Erdoganpun segera mengeluarkan beberapa kebijakan seperti, rakyat memilih secara langsung presidennya dan mengubah jabatan presiden yang semula 7 tahun sekali pergantian menjadi 2 kali dalam 7 tahun saja. Selain itu Erdogan berencana mencabut larangan pemakaian jilbab di lingkungan pemerintahan sehingga sempat dikritik sebagai upaya membawa formalisme Islam dan mengubah secara radikal tradisi politik Turki.

Tindakan radikal oleh AKP dapat dipastikan akan memancing kudeta tentara. Namun sebenarnya, kekhawatiran kubu sekularis dan tentara cukup berlebihan. AKP meskipun membawa nafas Islam tetapi tetap memegang prinsip sekularisme dan pluralisme. Justru beranjak dari hasil pemilu itu seharusnya menjadi bahan refleksi partai-partai yang secara formal menyatakan diri sebagai sekularis untuk mencari sebab-sebab menurunnya dukungan rakyat pada mereka. Berulang kali Erdogan menegaskan bahwa AKP dan pemerintahannya tetap berpijak pada prinsip dasar sekularisme yang selama ini menjadi tradisi dan dijunjung tinggi masyarakat Turki.

C. Kekepemimpinan AKP Tahun 2014

Pemerintahan AKP memberikan distribusi yang besar terhadap kebijakan luar negeri Turki. Hal tersebut dikarenakan identitas nasional Turki tidak lagi seutuhnya identitas Kemalist, namun telah bergeser menjadi Neo-Ottoman semenjak era Presiden Ozal, namun identitas tersebut semakin berkembang di era AKP, yang disebabkan beberapa faktor yaitu: adanya kejenuhan sebagian besar rakyat Turki yang menganggap bahwa elit Kemalist memaksakan legitimasi terhadap negara tanpa memikirkan hak asasi rakyatnya, Akses Turki ke Uni Eropa sebagai tujuan akhir Turki untuk mendapatkan legitimasi dari barat belum juga terwujud, Dan munculnya partai-partai berhaluan islam yang makin bebas semenjak tahun 1970an. Kemenangan AKP merupakan simbol bagi kompromi antara islam dan politik yang menjanjikan di Turki, karena AKP secara resmi adalah partai sekuler yang bekerja dalam negara dan sistem yang sekuler yang memperlihatkan komitmen genuine terhadap

konstitusionalism. Meskipun sikap partai yang memihak Islam juga terlihat jelas dan memungkinkannya untuk menggunakan kepercayaan agama untuk mendapatkan pendukungnya dalam masalah-masalah kebijakan publik sebagai pedoman untuk tindakan politiknya.

Isu yang paling menyita publik semenjak terpilihnya AKP adalah isu tentang debat mengenai jilbab yang menjadi masalah protokoler. Reaksi terhadap kehadiran istri Bulent Arinc, Presiden Majelis Agung Nasional yang memakai jilbab dalam acara diplomatik resmi menyulut reaksi yang lebih keras di media dan pemerintahan. Presiden Sezer yang dalam sambutannya beberapa hari setelah kejadian tersebut menyatakan “bahwa jilbab adalah pilihan pribadi yang hanya diperbolehkan dalam ruang privat” Namun, ia menegaskan bahwa masyarakat Turki diatur oleh hukum, bukan oleh agama maupun adat istiadat. Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan, dengan mengutip deskripsi Pengadilan Konstitusi, bahwa jilbab adalah simbol keagamaan yang harus dilarang di ruang publik.⁴⁶

Kalangan sekuler Turki memandang kerudung sebagai sebuah pernyataan politik yang menentang pemerintahan sekuler Turki dan ini seperti “Puncak gunung es fundamentalisme Islam” pada awal pemerintahan AKP. Pendukung fanatik sekularisme Turki, seperti Kenan Evren yang pertama kali melembagakan pelarangan jilbab ini pada tahun 1980an, menelusuri kebangkitan Islam politik di Turki yang ditandai dengan adanya sejumlah perempuan yang memakai jilbab ke negara-negara seperti Iran yang mereka anggap berusaha mengeksport Syari'ah ke Turki.⁴⁷ Namun bertahannya isu ini memperlihatkan bahwa banyak warga Turki yang terus

⁴⁶ Turkey Approves Headscarf Amnesty, Al-Jazeera.net, Edisi 6 Maret, 2005, diakses 17 Mei 2010.

⁴⁷ Ibid

mengambil posisi yang kuat dalam persoalan ini. Jelas pula bahwa penolakan masyarakat terhadap pelarangan jilbab ini berperan dalam menangnya partai AKP yang pro Islam pada tahun 2002. Meskipun demikian, AKP harus tetap bergerak lambat dan hati-hati menangani isu ini untuk menghindari reaksi keras dari kalangan sekuler atau dari militer. Kebijakan-kebijakan yang bisa diambil oleh AKP berkaitan dengan isu ini masih marginal dan hanya menangani simptom daripada akar permasalahan. Sebagai contoh, undang-undang mengenai amnesti yang akan memberikan pengampunan kepada 240.000 perempuan yang dikeluarkan dari universitas sejak tahun 2000 karena jilbab telah disetujui oleh parlemen turki pada bulan Maret 2005. dan berarti menghapuskan veto terhadap undang-undang yang pernah dilakukan Presiden Sezer.⁴⁸ AKP mengklaim bahwa pelarangan ini melanggar hak kebebasan beragama dan prinsip kesamaan kesempatan dalam pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan. sementara itu pendukung kebijakan pelarangan jilbab, termasuk Mustafa Bumin, Ketua Pengadilan Konstitusi, mengklaim bahwa usaha apapun untuk mengubah undang-undang yang mengizinkan perempuan untuk memakai jilbab di universitas atau kantor pelayanan masyarakat berarti melanggar UUD, dan dengan demikian, jika pelarangan jilbab dihapuskan, berarti undang-undang harus diamandemen.⁴⁹

Pemahaman yang sempit atau literal terhadap pasal-pasal tertentu dalam UUD Turki nampaknya mendukung pandangan yang terakhir ini. Pasal 24 UUD Turki tidak berbicara mengenai kebebasan beragama seperti yang disebutkan oleh para

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Turkey's Top Judge Rules Out Easing of Headscarf Ban, Middle East Times (26 April 2005), Lihat juga, 'The Capital Talking of a Headscarf Report,' NTV MSNBC-Turkey, 8 Februari 2004 (mengutip Deputi Ketua partai oposisi CHP, Mustafa Ozturk, yang mengatakan bahwa "kebebasan menggunakan jilbab berarti merubah Undang-Undang Dasar")

pengkritik kebijakan pelarangan jilbab itu, tapi "kebebasan, kepercayaan dan pengakuan agama. Ritual peribadatan, layanan keagamaan, dan acara-acara keagamaan harus dilaksanakan dengan bebas, diselenggarakan dengan cara yang tidak melanggar pasal 14". Tidak ada rujukan yang pasti untuk "penayangan simbol-simbol keagamaan" yang bisa memberikan kerangka untuk masalah jilbab ini. Para elit Kemalist, menganggap pelarangan jilbab beralasan bahwa karena memakai jilbab merupakan simbol islam politik, mengizinkannya berarti merupakan langkah awal untuk mengarahkan Turki yang sekuler mejadi negara yang tatanan hukumnya berdasarkan ajaran agama. dengan demikian, mengenakan jilbab merupakan tindakan eksploitasi atau penyalahgunaan agama yang dilarang oleh pasal 24. pasal-pasal lain yang rentan digunakan untuk menentang pelarangan jilbab seperti pasal mengenai hak untuk pendidikan (pasal 24), hak untuk bekerja (pasal 49), kesetaraan hak untuk perempuan (pasal 10) juga harus tunduk pada pembatasan yang tercantum dalam bab 14.⁵⁰ argumen-argumen yang berdasarkan artikel-artikel tadi nampaknya tidak begitu berpengaruh di lingkungan Mahkamah Konstitusi Turki.⁵¹

Terlepas dari isu domestik yang dihadapi oleh AKP, Kebijakan luar negeri AKP juga menjadi sorotan dunia internasional. Karena kebijakan luar negeri AKP yang baru merupakan refleksi dari pergeseran identitas yang mendasar yaitu Kemalist, walaupun tetap berada pada pada jalur kemalist dan demokrasi, Namun AKP berusaha untuk mengubah cara pandang Turki terhadap perubahan dunia Internasional. Dengan melihat identitas nasional Neottoman dari perspektif yang lebih luas untuk kemajuan kebijakan luar negeri sebagai berikut:

⁵⁰ Adrien Katherine Wing dan Ozan O Varol, *Is Secularism Possible in a Majority-Muslim Country: The Turkish Example*, 2006, hlm 31.

⁵¹ *Ibid*

Recep Tayyip Erdogan membawa para elit politik AKP ke pusat politik Turki. Kepala penasihatnya dan sekaligus sebagai Menteri Luar Negeri Turki dan seorang akademisi, Ahmet Davutoglu membuat seperangkat konsep-konsep baru yang tidak hanya akan melihat pergeseran tatanan dunia dari sudut pandang AKP, tetapi juga menarik untuk masa depan yang baru bagi Turki. Ide utamanya disebut sebagai "Strategic Depth" atau strategi mendalam yang merupakan judul sebuah buku yang sangat berpengaruh yang ditulisnya pada tahun 2001 oleh Davutoglu. Yang berjudul "Strategik Derinlik, Turkiye'nin Uluslararası Konumu (Strategi Mendalam, Posisi Internasional Turki)", yang diterbitkan tahun 2001.⁵²

Davutoglu yang juga merupakan seorang Profesor hubungan internasional di universitas-universitas di Turki dan Malaysia ini berpendapat bahwa:

"kebijakan luar negeri Turki tidak seimbang, dengan penekanan yang berlebihan pada hubungan dengan Eropa Barat dan Amerika Serikat untuk mengabaikan kepentingan Turki dengan negara-negara lain, khususnya di Timur Tengah. Dia berpendapat bahwa, tidak seperti kekuatan-kekuatan imperialis lainnya, untuk 80 tahun pertama setelah didirikan pada tahun 1923, Republik Turki telah mengabaikan sebagian negara-negara yang dahulu merupakan provinsi kekaisaran Ottoman seperti di Afrika Utara dan Timur Tengah, dan bahwa hari ini Turki harus memainkan peran yang lebih besar di sana".⁵³

Mengikuti logika ini, Turki telah memiliki warisan letak geopolitik yang pengaruh, khususnya kontrol atas Bosphorus, karena merupakan warisan kekaisaran

⁵² Kekuatan Kontinental Asia, <http://nasional.kompas.com>, diakses 14-10-2014, 10:47

⁵³ Ömer Taspinar, Turkey's Middle East Policies Between Neo-Ottomanism and Kemalism, Carnegie PAPERS no 10, Carnegie Middle East Center, 2008, hlm 14.

Ottoman.⁵⁴ Dikatakannya juga bahwa kebijakan luar negeri Turki sudah tidak sesuai dengan pendekatan yang berlebihan pada hubungan dengan Eropa dan AS, yang justru mengabaikan kepentingan Turki dengan negara-negara lain, khususnya timur tengah.⁵⁵

Dalam merumuskan kebijakan luar negeri, hal yang berpengaruh adalah unsur kepentingan nasional, dalam pencapaian kepentingan nasional hal penting yang melandasi itu adalah identitas nasional dan definisi pencapaian Power sebagai pencapaian akhir dalam kebijakan luar negeri.

Dalam mendefinisikan konsep Power unsur yang paling dominan adalah sejarah dan geografi, power yang dirumuskan oleh Davutoglu secara tersirat mengacu pada pandangan neo-Ottoman yaitu: Neo-Ottoman melihat Turki sebagai negara adidaya regional. Visi strategis dan budaya mencerminkan jangkauan geografis dari Kekaisaran Ottoman dan Byzantium.⁵⁶ Turki sebagai negara penting, sehingga harus memainkan diplomatik yang sangat aktif, peran politik, dan ekonomi di daerah luas yang merupakan ambisi besar seperti menjadi negara "pivotal"²⁹ yang pada gilirannya memerlukan negara-bangsa yang damai dengan multikulturalisme yang diwariskan kekaisarann Ottoman sebagai sebuah identitas Turki.³⁰ Strategic Depth memiliki empat prinsip utama yaitu zero problems with neighbours (nol masalah dengan negara tetangga) , outreach to adjacent regions (menjangkau wilayah-wilayah

⁵⁴ W. Joshua Walker Insight Turkey, Learning Strategic Depth: Implications of Turkey's New Foreign Policy Doctrine, diakses dari http://findarticles.com/p/articles/mi_7057/is_3_9/ai_n28498505/21 Oktober 2014.20:23.

⁵⁵ Zaman, Neo-Ottomanism and Kemalist Foreign Policy, 22 September 2008, diakses 15 Oktober 2014.08:20.

⁵⁶ Ömer Taspinar, Turkey's Middle East Policies Between Neo-Ottomanism and Kemalism, Carnegie PAPERS No 10, Carnegie Middle East Center, 2008

yang berdekatan), multi-dimensional foreign policy (Kebijakan Luar Negeri yang multi dimensi) dan rhythmic diplomacy (Diplomasi Berirama).

1. Zero Problems with Neighbours (Nol Masalah Dengan Negara Tetangga)

Davutoglu percaya bahwa dalam rangka untuk mendapatkan tempat yang layak di arena politik dunia, Turki harus mengikuti beberapa manner dalam berperilaku politik, yaitu: Rekonsiliasi dengan semua tetangga untuk mengamankan integritas teritorial Turki, terutama di timur dan tenggara. Turki telah mendapat keuntungan dengan penerapan "Zero Problems with Neighbours" karena telah berhasil membangun kembali kemitraan ekonomi, militer dan politik yang besar dengan Suriah dan Iran, dan telah didirikan kembali lama hilangnya hubungan diplomatik dengan Armenia, membantu rekonstruksi di Irak dan secara resmi diakui Kurdistan provinsi Irak Utara. Perkembangan dalam kembali diperbolehkan Turki untuk dilihat sebagai sekutu yang dapat dipercaya baik untuk Barat dan Timur.

2. Outreach to adjacent regions (Menjangkau Wilayah Yang Berdekatan)

Prinsip kedua Davutoglu adalah mengembangkan hubungan dengan tetangga dekat Turki. Turki Telah berpendapat bahwa dampak regional telah meluas ke Balkan, Timur Tengah, Kaukasus dan Asia Tengah. Oleh karena itu, aktif di Balkan melalui partisipasi dalam misi NATO, di Timur Tengah melalui keterlibatan erat dalam rekonstruksi Libanon serta hak-hak Palestina dan di Asia Tengah melalui proyek-proyek pipa energy, telah mengembangkan

pengaruh Turki.⁵⁷ keterlibatan yang erat dengan daerah yang berdekatan dan membangun

soft power adalah sangat penting menurut Davutoglu yang mengklaim bahwa: "hari ini, kita tahu bahwa hanya negara yang pengaruh melintasi perbatasan mereka menggunakan 'soft power' benar-benar dapat melindungi diri mereka sendiri."⁵⁸

3. Multi-dimensional Foreign Policy (Kebijakan Luar Negeri yang multi dimensi)

Prinsip ketiga adalah kepatuhan terhadap kebijakan multi-dimensi asing. Prinsip ini memerlukan keterlibatan dalam saling melengkapi dan bukan hubungan kompetitif dengan kekuatan global. Dengan menerapkan pendekatan yang berbeda dalam setiap masalah, mempertimbangkan harapan dan aturan yang ada dalam diplomasi internasional. Dalam hal ini, Davutoglu menggarisbawahi hubungan strategis Turki dengan AS melalui hubungan bilateral kedua negara dan melalui NATO, dan proses akses Turki ke Uni Eropa, baik lingkungan kebijakannya dengan Rusia, dan kebijakan sinkronisasi di Eurasia menjadi bagian integral dan saling melengkapi dalam konsistensi kebijakan.⁵⁹

4. Rhythmic Diplomacy (Diplomasi Berirama).

Prinsip terakhir adalah diplomasi berirama. Turki telah menyelenggarakan pertemuan internasional penting saat mengejar bidang

⁵⁷ W. Joshua Walker Insight Turkey, Learning Strategic Depth: Implications of Turkey's New Foreign Policy Doctrine, July 2007, diakses dari http://findarticles.com/p/articles/mi_7057/is_3_9/ai_n28498505/21 Oktober 2014.20:23.

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid

diplomasi dengan kedua aktor negara dan non-negara termasuk Hamas. Sejak tahun 2003 Turki telah menyelenggarakan pertemuan puncak NATO, puncak (Organisasi Konferensi Islam) OKI, Forum Air Dunia di tahun 2009. Ini merupakan peningkatan aktivitas memberikan kontribusi kepada Turki untuk terpilih sebagai salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2009, memberikan bobot republik yang lebih dalam mengejar tujuan-tujuan kebijakan luar negerinya.